

## **BAB III**

### **PERLAWANAN WARGA BALIREJO DALAM MENOLAK PEMBANGUNAN APARTEMEN PURI NOTOPROJO**

#### **1. Warga Balirejo Sebagai Gerakan Sosial**

Gerakan perlawanan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup bangkit dan muncul pada pertengahan abad dua puluh, munculnya gerakan dengan keinginan untuk adanya perubahan secara menyeluruh dan mendasar antara hubungan manusia dan alam dengan mempelajari konsep metafisika, kosmologi dan etika dalam menjaga lingkungan hidup(Situmorang, 2013:67).

Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia dapat dilihat bahwa gerakan sosial sudah sangat berkembang dan terus berlanjut, akibat dari keserakahan manusia yang sadar atau tidak sadar telah merusak alam yang berdampak kembali kepada makhluk yang ada di bumi Indonesia. Mewujudkan cita-cita keberhasilan dalam gerakan sosial merupakan suatu hal yang tidak lepas dari pengalaman kegagalan yang banyak terjadi.

Kota sebagai lingkungan hidup buatan dapat dilihat hasil dan proses interaksi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan. Pembangunan dapat optimal apabila didukung oleh perencanaan yang memadai. Salah satu dampak pembangunan terjadi pada sumber daya alam dan lingkungan. Akibat dampak berupa degradasi lingkungan, yang apabila dibiarkan akan merusak lingkungan kemudian menurunkan kualitas lingkungan(Jamaludin, 2017:89).

Perkembangan gerakan atas dasar lingkungan muncul dan berkembang dengan membawa misi perubahan, salah satu yang utama adalah untuk memberikan kesadaran bahwa manusia dan alam harus memberikan

keseimbangan satu sama lain dan satu sama lain memiliki ketergantungan. Ada beberapa hal penting yang ada dalam gerakan ini yaitu keinginan untuk merubah mental dan psikologi ketika melihat hubungan antara manusia dan alam semesta, seperti memberikan tempat untuk makhluk hidup lainnya berkembang dengan kesempatan yang sama dengan manusia. Kemudian, kegunaan ilmu pengetahuan seperti teknologi yang digunakan adalah untuk mempermudah dan memberikan kualitas yang baik, bukannya jadi menghancurkan kualitas makhluk hidup.

Dalam bab ini, penulis akan memulai pembahasan mengenai salah satu gerakan sosial yang menjadikan lingkungan sebagai alasan dilakukannya perlawanan masyarakat Balirejo. Penulis akan mengidentifikasi bahwa gerakan yang diawali dengan kesamaan prinsip untuk menjaga lingkungan untuk generasi penerus merupakan suatu gerakan sosial. Digunakan 4 indikator kepada masyarakat balirejo sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Balirejo sebagai gerakan sosial.

#### A. Tantangan Kolektif

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori dari Tarrow dalam (Suharko, 2006:5-7) menjelaskan bahwa dalam gerakan sosial terdapat empat indikator yang digunakan yaitu tantangan kolektif, yang merupakan keadaan untuk menghalangi kegiatan golongan lain yang menjadi salah satu tanda dari tantangan kolektif. Keadaan untuk bersamama-sama menentang dengan melalui slogan, corak pakaian merupakan bagian yang banyak dilihat dari suatu gerakan sosial.

Sebagai gerakan yang terbentuk dari latar belakang oleh keinginan untuk menjaga kerusakan lingkungan. Kampung balirejo menjadi target untuk investor melebarkan sayap sejak tahun 2015 dengan niat mendirikan bangunan apartemen dan toko. Pengembang pertama ingin melakukan pembangunan apartemen, namun karena tidak mendapat izin dari masyarakat. Pengembang kedua ingin membangun dua toko besar dan pengembang ketiga adalah yang sekarang sedang terjadi yaitu pembangunan apartemen Puri Notoprojo. Seperti yang diceritakan sendiri dalam wawancara dengan bapak Dono Susilo selaku Ketua RW 05 Balirejo pada 18 Mei 2019:

“iya mas dulu sebelum saya sudah ada penolakan, ini yang ketiga kalinya investor datang, yang pertama dulu niatnya membangun apartemen juga, yang kedua toko besar tetapi kami menolak terus gak jadi dibangun terus yang ketiga apartemen lagi”

Dari ungkapan diatas, menceritakan bahwa tantangan kolektif terbentuknya perlawanan dari masyarakat secara bersama, untuk menghadapi pembangunan yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak stabil. Masyarakat tetap dengan kebersamaan untuk menolak. Penolakan yang dilakukan bukannya tanpa alasan tetapi warga ingin lingkungannya tidak rusak. Seperti yang diceritakan dalam wawancara dengan bapak Harjono selaku Ketua RT 49 Balirejo pada 27 Mei 2019:

“inikan jalan kampung, coba mas lewat disitu pas pagi atau sore pasti macet, seumpama jadi dibangun kan sekitar 300an kamar dan minimal ada satu mobil. sudah tidak mungkin itu, jadi kayak apa nanti jalanannya. Terus limbahnya nanti gimana, masa dibuang di kali, wes gak mungkin lah itu.”

Kegiatan penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat balirejo ternyata mendapat respon positif dari masyarakat sekitar, meskipun ada

beberapa warga yang pro atas pembangunan apartemen seperti yang diceritakan bapak Dono Susilo ketua RW 05 Balirejo wawancara pada 18 Mei 2019:

“kalau yang pro itu jelas ada, motifnya mereka diberikan embel-embel dibelakangnya. Tetapi jumlah mereka gak banyak.”

Hal tersebut sama dengan yang diceritakan oleh bapak Sudarto Ketua RT 17 wawancara pada 19 Mei 2019:

“jadi yang pro dalam setiap rt itu pasti ada satu orang, dengan niatan akan dijadikan ketua rt lah, kemudian jadi satpam lah”

Dalam proses perlawanan ternyata terdapat ketidakseimbangan antara pihak kelurahan dan masyarakat. Dikarenakan pengambilan keputusan dari kelurahan dianggap berat sebelah ke pihak pengembang. Selain itu, tanggapan dari pihak kelurahan terhadap pembangunan apartemen ini adalah setuju selama masyarakat setuju maka dari pihak kelurahan akan memberikan dukungan. Seperti yang diceritakan bapak Jemari lurah Muja Muju wawancara pada 11 Juni 2019:

“sikap kelurahan tetap pada posisi netral. Kami tetap memberikan fasilitas dari pengelola dan masyarakat untuk melakukan pertemuan. Yang saya tau selama ini masyarakat tetap menolak kedatangan dari pengembang meskipun ada juga yang setuju”

Munculnya masalah antara warga yang setuju dan tidak setuju ternyata kurang diantisipasi dengan baik oleh pihak kelurahan. Sikap pihak kelurahan yang berada diposisi netral ternyata tidak sesuai kenyataan dan ini membuat warga menjadi tidak percaya, karena permasalahan ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup banyak orang. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan mereka menjadi hal yang sangat

membantu dalam perjuangan menolak pembangunan apartemen Puri Notoprojo selama ini.

#### B. Tujuan bersama

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori dari Tarrow dalam (Suharko 2006:5-7) yang menjelaskan bahwa dalam gerakan sosial terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu adanya tujuan bersama. Kalau ingin mencari alasan kenapa orang ingin bersama untuk melakukan gerakan adalah untuk melawan atau menentang pihak lain yang dirasa merugikan banyak pihak. Tidak semua konflik yang muncul adalah atas nama kepentingan kelas saja tetapi sesuatu yang berguna untuk kepentingan bersama merupakan basis dari tindakan bersama.

Individu-individu yang terlibat dalam penolakan memang terdiri dari berbagai strata sosial, sehingga masyarakat memiliki kekuatan yang berlapis. Meskipun dari struktur sosial banyak yang memiliki tingkat kualitas yang baik, tetapi tetap menolak jika akan dibangun apartemen diwilayah mereka. Seperti yang diceritakan oleh bapak Sudarto ketua RT 17 Balirejo wawancara pada 19 Mei 2019:

“kalau didaerah kami memang kebanyakan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, tetapi yang dibelakang lokasi pembangunan itu yang tinggal orang-orang besar jenderal dan dosen-dosen semua mas, jadi kita tidak mudah untuk dihasut.”

Bahaya akan kerusakan lingkungan menjadi pendorong pribadi-pribadi masyarakat yang terlibat dalam gerakan menolak pembangunan apartemen. Masyarakat balirejo melakukan pertemuan yang kemudian dituliskan dalam berita acara hasil pertemuan warga Balirejo penolakan pembangunan apartemen, bertempat di balai RT. 52 RW. 05 Muja-Muju Umbulharjo

Yogyakarta.” Pertemuan yang diadakan pada Tanggal 17 Juni 2017 yang dihadiri warga balirejo meliputi: RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 49, RT. 51 dan RT 52. Dalam wilayah RW 05 dan RT. 18, 19, 20, 53 (RW 06) dan Kampung Tangguh Bencana (KTB) Balirejo. Adapun hasil pertemuan menetapkan sebagai berikut:

- a Warga Balirejo menolak rencana pembangunan apartemen dikarenakan lebih banyak mudharatnya, dan sama sekali tidak ada manfaatnya bagi warga.
- b Warga Balirejo melarang keras kepada ketua RT di Wilayah RW. 05 dan ketua RW, untuk menumbuhkan tanda tangan serta cap/stempel terhadap surat-surat dan atau administrasi lainnya berkenaan dengan pengajuan izin rencana pembangunan apartemen.
- c Warga Balirejo menyatakan tidak mengakui jika ada surat yang ditandatangani oleh oknum yang mengatasnamakan pengurus RT. 50 dikarenakan warga sama sekali tidak tahu menahu hal tersebut.

Tujuan dari penolakan masyarakat adalah agar proses pembangunan dapat dibatalkan dikarenakan banyaknya masalah yang akan terjadi seperti yang sudah diceritakan bahwa lokasi pembangunan sangat tidak memungkinkan. Untuk saat ini gerakan perlawanan masyarakat balirejo dapat dikatakan berhasil karena proses pembangunan telah diberhentikan, meskipun ada masyarakat yang setuju, tetapi masyarakat secara luas tetap menolak pembangunan apartemen sampai kapanpun.

### C. Solidaritas Kolektif dan Identitas Kolektif

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori dari Tarrow dalam (Suharko, 2006:5-7) yang menjelaskan bahwa dalam gerakan sosial terdapat empat indikator diantaranya yaitu memiliki Solidaritas dan Identitas Kolektif yang berarti munculnya keinginan untuk bergerak bersama dalam gerakan sosial, yang awalnya hanya kemungkinan untuk melakukan pergerakan berubah menjadi kenyataan. Menjaga identitas kolektif menjadi hal yang sangat mendasar dalam melakukan pergerakan, dengan keadaan yang sama ataupun dengan menyamakan keadaan dengan orang lain. Namun, para pemimpin gerakan sosial dapat melakukan gerakan ketika melihat dan menggugah perasaan solidaritas dan identitas yang bersumber dari nasionalisme, etnisitas atau keyakinan agama.

Permasalahan yang menjadi faktor masyarakat Balirejo bergerak adalah permasalahan yang terkait dengan izin pembangunan dan masalah lingkungan. Dono Susilo Ketua RW 05 menceritakan pada wawancara 18 Mei 2019

“kami mulai protes, karena pihak pengembangnya itu belum ada izin dari kami, kemudian IMB nya belum keluar, tapi sudah melakukan pembangunan pembatas yang di depan itu.”

Melihat apa yang diutarakan diatas bahwa izin yang dimaksudkan adalah mengenai AMDAL yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat. Inilah yang membuat masyarakat tidak setuju dan melakukan pergerakan. Sesuai dengan yang diceritakan bapak Sudarto Ketua RT 17 wawancara pada 19 Mei 2019:

“kami dari warga itu tidak pernah menandatangani apapun dengan pihak sana, kok ujuk-ujuk sudah membangun aja.”

Melihat penjelasan diatas, bahwa sebelum melakukan pembangunan maka harus ada izin yang dikeluarkan dari pemerintah dalam hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Widjonarko selaku Kepala Seksi Konsultasi dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan wawancara pada 13 Juni 2019:

“IMB itu prosedur utama, kemudian dilihat kembali fungsi dan kegunaannya nanti seperti apa. Terkait gangguannya nanti harus ada rancangannya terlebih dahulu.”

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 85 Tahun 2018. Yang didalamnya telah mengatur mengenai perizinan terkait IMB. Pihak Dinas belum mengeluarkan Izin Mendirikan bangunan dikarenakan AMDAL yang merupakan salah satu syarat dikeluarkannya IMB belum dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Atas dasar ketimpangan yang terjadilah yang membuat masyarakat menjadi bersatu untuk menolak pembangunan apartemen di daerah Balirejo. seperti yang telah dijelaskan diatas, menurut warga balirejo apabila rencana pembangunan ini berlanjut dan berhasil dioperasikan, maka dampak yang dirasakan masyarakat pasti sangat besar terutama masalah lingkungan seperti kemacetan yang akan sangat sulit untuk diatasi.

Kolektivitas aksi masyarakat Balirejo membentuk suatu identitas kolektif berdasarkan atas kepedulian untuk menjaga lingkungan. Aksi yang dilakukan masyarakat balirejo tidak lain adalah menjaga perkampungan tempat mereka hidup agar tidak timbul masalah yang nantinya dirasakan oleh generasi selanjutnya.

#### D. Memelihara Politik Perlawanan

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori dari Tarrow dalam (Suharko, 2006:5-7) yang menjelaskan dalam gerakan sosial terdapat empat indikator diantaranya yaitu memelihara politik perlawanan, yang dalam kaitannya dengan gerakan sosial adalah menjaga tujuan bersama agar arah dari gerakan tidak berubah menjadi kemarahan dan kebencian yang dapat membuat kerugian bagi pihak yang melakukan perlawanan. Sikap hati-hati dalam memandang dan menyikapi suatu informasi harus terus dipelajari agar propaganda tidak terjadi.

Dalam perjalanan menghadapi pembangunan Apartemen Puri Notoprojo, masyarakat balirejo mendapat berbagai tantangan. Seperti adu domba yang menjadi skenario untuk membuat antar warga berkonflik, kemudian sikap dari beberapa kelurahan dan kecamatan yang tidak seimbang dalam melihat masalah ini. Namun, dari pihak masyarakat sendiri tetap konsisten dan bersama-sama menentang adanya pembangunan apartemen. Sesuai dengan yang diceritakan bapak Dono Susilo Ketua RW 05 wawancara pada 18 Mei 2019:

“saya sering mendapat tekanan, sering mereka datang untuk membahas dan itu berganti-ganti terus mas. Kalau mereka datangnya rombongan langsung chat di grup wa jadi kami tetap solid.”

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh bapak Sudarto ketua RT 17 wawancara pada 19 Mei 2019:

“neng kita tetep kokoh rt tetap gigih ra iso ganti, warga bilang gitu. Jangan ganti kita solid yah, warga sepakat tidak setuju dan menyerahkan pada rt dan rw masing-masing.”

Dari ungkapan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat mempercayai bahwa dengan kebersamaan yang dijaga akan membuat kekuatan yang besar untuk terus dapat berjuang menjaga daerah tempat tinggal mereka. Meskipun banyak mendapat tantangan, tetapi masyarakat tetap percaya dengan pemimpin mereka yang disini diwakili oleh RT dan RW untuk berjuang bersama dan memasrahkan semuanya. Suasana dan semangat inilah yang terus dijaga oleh masyarakat untuk tetap konsisten memperjuangkan hak mereka.

Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Balirejo dapat dikatakan sebagai gerakan konservatif. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kornblum dalam (Sunarto, 2014) bahwa gerakan yang berupaya untuk mempertahankan nilai dan institusi masyarakat disebut sebagai gerakan konservatif. Dapat dilihat bahwa perlawanan yang dilakukan masyarakat balirejo adalah untuk mempertahankan nilai-nilai dalam masyarakat yang layak untuk hidup dengan damai dan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, sebagai sarana untuk bertahan hidup. Berbagai isu digunakan warga Balirejo untuk menolak pembangunan. Salah satunya adalah terkait kesenjangan sosial. Nilai kearifan lokal serta guyup rukun dikhawatirkan akan mulai berkurang, bahkan bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tentunya gerakan yang dilakukan adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai yang ada pada masyarakat Balirejo.

Berikut adalah Tabel perlawanan warga Balirejo sebagai gerakan sosial menurut teori Sidney Tarrow dalam (Suharko, 2006).

**Tabel 3. Warga Balirejo Sebagai Gerakan Sosial**

| NO | INDIKATOR                          | TUJUAN   |
|----|------------------------------------|--|
| 1  | Tantangan Kolektif                 | Menghadapi kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup warga Balirejo                           |
| 2  | Tujuan Bersama                     | Membatalkan rencana pembangunan apartemen Puri Notoprojo, dikarenakan banyak masalah yang akan ditimbulkan |
| 3  | Solidaritas dan Identitas Kolektif | Kecintaan terhadap lingkungan  |
| 4  | Memelihara Politik Perlawanan      | Gerakan yang bersifat kerelawanan dan persaudaraan dari setiap individu yang ikut berpartisipasi           |

## **2. Perlawanan Warga Balirejo Terhadap Pembangunan Apartemen**

Pada bagian ini, penulis akan menarasikan berbagai bentuk perlawanan yang terjadi oleh masyarakat Balirejo terhadap pembangunan apartemen Puri Notoprojo di Dusun Balirejo. Dalam mengkaji perlawanan masyarakat Balirejo penulis menggunakan teori Kelompok Kepentingan Non-Asosiasional. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tumbuh dan berkembangnya gerakan perlawanan yang terjadi disana.

Pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat tinggi dan berkaitan dengan pendidikan pariwisata. Mahasiswa luar daerah yang setiap tahunnya banyak berdatangan untuk menuntut ilmu menjadi penyumbang kepadatan penduduk. Kondisi inilah yang digunakan untuk mendirikan kos-kosan yang bertingkat, dan berkembang menjadi pembangunan apartemen dengan model yang lebih eksklusif dan menawarkan kenyamanan. Tercatat bahwa pertumbuhan pembangunan apartemen di DIY sangat pesat dan banyak kasus yang mengalami perlawanan dari masyarakat sekitaran lokasi pembangunan.

Begitu pula yang terjadi di Dusun Balirejo, terdapat berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan dari aktifitas pembangunan apartemen Puri Notoprojo.

#### A. Alasan Penolakan Terhadap Apartemen

Pembangunan identik dengan pembangunan dengan skala nasional dengan fokus untuk pembangunan perekonomian. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb, dengan prinsip utama untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan)).

Pergerakan masyarakat balirejo dilakukan diantaranya adalah kekhawatiran akan lingkungan yang rusak dan tidak dapat dirasakan untuk anak cucu. Berikut ada beberapa alasan penolakan masyarakat Balirejo dalam menolak pembangunan Apartemen Puri Notoprojo:

##### a. Berdampak kepada Akses Sosial

Menurut Fardani (2012:6) mengatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat. berikut ada beberapa dampak sosial yang menjadi alasan warga balirejo menolak pembangunan apartemen.

#### a) Kesenjangan Sosial

Menurut Badruzaman (2009;284) dalam penemuannya mengatakan bahwa kesenjangan sosial adalah suatu pola ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat dengan perbedaan yang sangat mencolok. Atau bisa diartikan bahwa orang kaya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin.

Ketakutan masyarakat balirejo akan munculnya masalah sosial adalah dengan melihat bahwa sifat individual akan sangat tinggi. Hunian yang akan ditempati adalah hunian yang memiliki desain yang seperti perhotelan, maka masyarakat sangat khawatir akan munculnya batasan antara para penghuni apartemen dan masyarakat sekitar. Masyarakat merasa akan berkurangnya rasa simpati, toleransi, keakraban jika yang menghuni adalah masyarakat yang dari kalangan eksklusif. Kekhawatiran ini juga yang disampaikan oleh bapak Sudarto ketua RT 17 Balirejo wawancara pada 19 Mei 2019:

“...orang-orang yang tinggal di apartemen apa nantinya mereka mau ikut dengan kegiatan warga disini, gak mungkin lawong sugeh kok.”

Sesuai dengan yang ditegaskan oleh Bapak Dono Susilo Ketua RW 05 Balirejo pada 18 Mei 2019:

“apa bedanya dengan hotel, kalau apartemen nanti dibangun, keterbatasan dengan warga nantinya pasti terjadi. Walaupun mengatas namakan apartemen.”

Menurut penulis Warga balirejo sangat mencemaskan dampak sosial yang akan terjadi seperti yang banyak terjadi di berbagai apartemen, seperti seringnya terjadi gesekan antara penghuni apartemen dengan warga sekitar, atau minimalnya tidak adanya interaksi sosial penghuni apartemen dengan warga sekitar, yang mengakibatkan tidak terjalin suasana guyub rukun dan damai.

#### b) Keamanan

Keamanan juga menjadi salah satu masalah sosial, sehingga menjadi alasan warga menolak pembangunan apartemen, sesuai dengan surat yang dibuat oleh warga balirejo melalui perwakilan setiap ketua RT yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 10 September 2018 yang didalamnya mengatakan bahwa warga asli Balirejo dan pengampu wilayah (RT dan RW) tidak dapat mengawasi langsung aktivitas para penghuni Apartemen yang barangkali potensial terjadi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, free sex, perdagangan senjata ilegal, juga pembuatan bahan-bahan narkotik. Di samping kemungkinan disusupi teroris. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nuryana tokoh masyarakat RT 52 wawancara pada 26 Mei 2019:

“..kami disini masih hidup dengan kearifan lokal, kami tidak ingin ada yang dilanggar. Apalagi jaman sekarang, miras sama obat obatan kan berbahaya.”

Menurut penulis, Hal inilah yang dikhawatirkan masyarakat Balirejo karena masyarakat tidak bisa sepenuhnya mengontrol

keadaan yang ada di apartemen dan juga bertentangan dengan ruh keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasari pola hidup masyarakat berbudaya dan bermartabat.

b. Berdampak Kepada Akses Fisik

Menurut penemuan dari Supardi (2003:183) mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan tuhan termasuk manusia. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan membuat manusia harus menjaga lingkungan mereka dari bahaya perbuatan manusia itu sendiri.

Menurut peneliti, Berdasarkan teori diatas udara dan air merupakan isu sensitif yang menjadi acuan masyarakat balirejo melakukan gerakan menolak agar mereka tidak kehilangan sumber daya untuk menunjang kehidupan mereka. Terdapat dua dampak akses fisik yang sangat membahayakan lingkungan jika apartemen berhasil dibangun yaitu:

a) Kualitas Air Berkurang

Menurut Lestari (2012) menjelaskan bahwa air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Air juga memiliki sifat yang penting sebagai sumber kehidupan. Pembangunan apartemen dengan ketinggian lebih dari 5 lantai akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Menurut Sesanti (2016: 105) meningkatnya area terbangun diwilayah perkotaan berdampak pada berkurangnya kualitas dan

kuantitas sumber daya air. Faktor –faktor kuat yang terkait dengan penurunan air di perkotaan yakni: (1) laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk perkotaan yang tinggi sehingga kebutuhan air bersih meningkat serta peningkatan polusi sumber air bersih; (2) penggunaan lahan di perkotaan tanpa perbandingan antara lahan terbangun dan terbuka yang mengakibatkan fungsi penyerapan air tanah terganggu; (3) erosi dan pencemaran air akibat limbah buangan dari aktifitas domestic, perindustrian maupun pertanian; (4) adanya eksploitasi penggunaan air bersih yang berlebihan oleh gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen dan hotel.

Dampak yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah masalah kapasitas air yang akan sangat terkuras oleh apartemen. Melihat bahwa rencana pembangunan akan menggunakan air dari PDAM, namun warga tetap tidak setuju dan khawatir jikalau apartemen sampai didirikan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Dono Susilo Ketua RW 05 Wawancara pada 18 Mei 2019:

“iya masalah volume air menjadi salah satu masalah nantinya. Kalau alasannya mau pakai PDAM, wong PDAM saja airnya sudah seret-seret kok. Lima tahun terakhir ini sumur di areal balirejo sudah menurun drastis debitnya, Apalagi nanti dibagi dengan apartemen.”

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Nur tokoh masyarakat RT 52 wawancara pada 26 Mei 2019:

“...masalah air nanti jadi masalah mas, kita lihat aja dari pengalaman yang lain-lain.”

Menurut peneliti, apa yang resahkan oleh masyarakat balirejo terkait sumber air yang berkurang, dikarenakan telah banyak terjadi di berbagai tempat di Kota Yogyakarta contoh kasus yang dapat diambil sebagai pelajaran. Isu yang diangkat oleh warga sangat baik, dikarenakan sudah pernah terjadi kasus kekeringan yang melanda beberapa daerah di Yogyakarta akibat pembangunan apartemen maupun hotel. Salah satu contoh kasus yang tidak jauh dari kampung balirejo yaitu Hotel Fave yang cukup viral terkait kasus kekeringan yang dirasakan warga sekitaran. Isu ini juga dapat membuat pihak pemerintah lebih tegas lagi dalam melihat fenomena kekeringan air yang sering terjadi.

#### b) Polusi Udara

Menurut Chambers dalam (Mukono, 2006) mengatakan pencemaran udara adalah bahan atau kimia yang bertambah ke dalam lingkungan udara normal yang dapat dideteksi oleh manusia serta dapat memberikan efek kepada manusia.

Melihat profil monografi dari kelurahan Muja-Muju halaman 9, kampung Balirejo termasuk daerah kawasan tanah kering 153.00 Ha dengan jumlah lokasi pencemaran 1. Dengan berdirinya apartemen maka, efek negatif polusi akan tinggi, artinya jika setiap yang menghuni di apartemen mempunyai satu mobil maka polusinya sangat berbahaya. Proses pembangunan

juga nantinya akan sangat mengganggu masyarakat sekitar seperti yang dikatakan oleh bapak Agus Sukarjo selaku ketua RT 16 Balirejo, yang rumahnya berada tepat didepan lokasi.wawancara pada 21 Mei 2019:

“kemacetan sama polusi ne nanti akan mengganggu warga sini mas, kalau proses pembangunan yang dateng kan mobil-mobil gede, terus suara dan debunya pasti mengganggu.”

Menurut peneliti, polusi udara merupakan salah satu masalah yang banyak terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Apalagi di Daerah perkotaan, hal ini dikarenakan membludaknya kendaraan yang ada dan membuat sulitnya mendapatkan udara segar. isu terkait polusi udara yang akan membahayakan masyarakat sangat masuk akal untuk dijadikan alasan penolakan.

c. Berdampak kepada Akses Lalu Lintas

Menurut penemuan dari Ety Soesilowati (2008) mengatakan bahwa secara ekonomis, kemacetan lalu lintas akan berdampak ke biaya operasional yang tinggi, hilangnya waktu, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki.

Melihat dari kenyataan bahwa nantinya yang akan tinggal adalah mereka yang perekonomiannya menengah keatas. Dengan fasilitas yang pastinya dimiliki oleh setiap yang tinggal di apartemen akan membuat kemacetan, dikarenakan oleh jalan yang berada pas didepan apartemen adalah jalan kampung yang kecil dan ketika pagi dan sore sering terjadi kemacetan. Hal ini yang telah dijelaskan oleh

bapak Sudarato diatas. Dan dipertegas oleh bapak Dono Susilo ketua RW 05 Balirejo wawancara pada 18 Mei 2019:

“..iya kalau kemacetan sekarang sudah sering terjadi, dan itu sangat mengganggu aktifitas warga. Apalagi jalanannya kan kecil.”

Menurut peneliti, apabila apartemen didirikan maka akses lalu lintas masyarakat Balirejo akan semakin sulit dan berdampak kepada kualitas udara dan stress sesama pengguna jalan yang dapat memicu sengketa di antara pengguna jalan. Hal tersebut berdasarkan fakta yang ada dilapangan, lokasi tempat rencana pembangunan memiliki badan jalan yang sempit, tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi yang padat, dan ditambah dengan aktivitas apartemen baik dari tahap pembangunan maupun tahap operasional nantinya.

## **B. Bentuk-Bentuk Perlawanan Warga Balirejo**

Apartemen Puri Notoprojo yang nantinya akan dibangun di sekitaran RW 05 sampai saat ini terus diawasi dan diupayakan oleh masyarakat agar tidak terjadi. Masyarakat tidak menerima jika nantinya akan dibangun apartemen dikawasan mereka dengan alasan yang telah disampaikan diatas. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan yang diupayakan oleh warga balirejo khususnya RW 05 dan 06 dalam menolak pembangunan apartemen puri Notoprojo sebagai berikut:

### **a Warga Balirejo RW 05 dan RW 06 Membuat Petisi Penolakan**

Berpartisipasi guna melakukan sebuah perubahan merupakan hak untuk setiap orang. Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil

langkah tegas terhadap suatu hal. Hak petisi berada pada warga Negara dan juga badan-badan pemerintahan, seperti kotapraja, kabupaten dan provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daerahnya ([https://id.wikipedia.org/wiki/Petisi#cite\\_note-ensiklopedi-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Petisi#cite_note-ensiklopedi-1)).

Dalam memperjuangkan hak mereka atas daerahnya. Warga balirejo melalui pengurus RW 05 dan RW 06 menyusun strategi dengan melakukan petisi yang ditandatangani oleh kedua pengurus RT dan RW. Sesuai yang telah dijelaskan diatas apa isi dari petisi yang dituangkan dalam berita acara yang ditujukan kepada Walikota Yogyakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Camat Umbulharjo, dan Lurah Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Dono Susilo ketua RW 05 Balirejo wawancara pada 16 Juni 2019:

“..iya saat itu kami memberikan ke semua instansi mas, isinya lengkap alasan dan tanda tangan dan stempel dari setiap RT.”

Menuru peneliti, Dengan petisi yang dibuat dan dilengkapi dengan tanda tangan serta cap resmi dari setiap RT dan RW 05 dan 06 agar pembangunan dapat dibatalkan cukup berhasil membuat pihak pengembang kesulitan. Dikarenakan orang-orang yang bertanda tangan dalam petisi penolakan adalah mereka yang dipercaya sebagai perwakilan suara warga Balirejo. Disini juga terlihat bagaimana solidaritas yang dijaga oleh setiap pemimpin dari setiap RT maupun RW sebagai perwakilan suara rakyat untuk satu

suara menolak pembangunan. Perkembangan era teknologi sekarang memang sangat mempengaruhi, petisi pada era perkembangan teknologi dapat lebih mudah dan lebih cepat serta efektif. Namun untuk kasus yang ada di balirejo, petisi yang dibuat tersampaikan ke semua elemen yang terkait dan terbukti menjadi salah satu pengaruh apartemen berhenti pembangunannya.

Ternyata langkah membuat petisi untuk menyuarakan hak-hak pernah terjadi, salah satu contoh adalah pembangunan apartemen Utara The Icon yang pada saat peringatan HUT RI ke 71 di Karangwuni, petisi dibacakan dalam acara malam tirakatan. Ternyata apa yang dilakukan masyarakat karangwuni waktu itu tidak mendapatkan jalan keluar atas keluhan mereka, terbukti bahwa pembangunan masih terus berjalan dan sekarang sudah beroperasi(<https://nusantaranews.co/petisi-warga-tolak-pembangunan-warnai-peringatan-hut-ri-ke-71-di-karangwuni-yogyakarta/>).

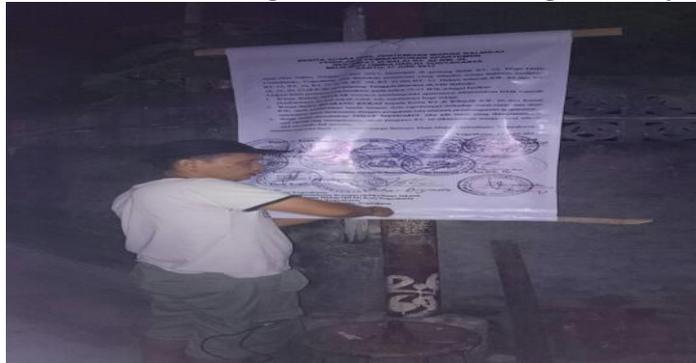
**Gambar 4 : Petisi Penolakan Pembangunan**



*Sumber: Dokumentasi Mas Andi*

Tidak sampai disitu saja, warga kemudian membuat baliho dari hasil petisi yang dibuat yang telah ditandatangani dan distempel oleh perwakilan RT dan RW yang kemudian di pasang dipinggir jalan. Lihat gambar.

**Gambar 5 : Pemasangan Petisi Oleh Warga Balirejo**



*Sumber: Dokumentasi Mas Andi*

**b Warga Balirejo Membuat Baliho**

Keinginan masyarakat untuk terus berjuang menolak pembangunan apartemen tidak berhenti hanya melalui petisi saja. Selain bentuk perlawanan diatas, membuat dan memasang baliho disepanjang jalan dikampung dan di depan lokasi pembangunan

merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat. adapun biaya pembuatan baliho adalah dari iuran para relawan atau ketua RW dan para ketua RT. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Sukarjo Ketua RT 16 Balirejo wawancara pada 21 Mei 2019:

“kalau spanduk kami pasang di jalan-jalan, didepan lokasi pembangunan juga ada kami pasang.”

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sudarto ketua RT 17 wawancara pada 19 Mei 2019:

“baliho yang kami pasang itu baru terus mas, ya pokoknya setiap rusak atau robek langsung ganti baru. Dana dari sumbangan orang yang diperumahan belakang sana.”

Meskipun pemasangan baliho yang dilakukan warga ternyata mendapat perlawanan, dengan sering adanya baliho yang tiba tiba robek dan hilang akibat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Warga tetap rutin untuk memasang dan mengganti dengan yang baru. Baliho yang dipasang masyarakat bukan hanya asal-asalan.

Menurut peneliti, membuat dan memasang baliho yang dilakukan warga Balirejo cukup berguna. Baliho disini digunakan oleh masyarakat untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas terkait penolakan apartemen. Baliho yang dipasang sangat menggambarkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Dengan adanya baliho terpasang warga berharap kalau pemerintah bisa mengambil tindakan yang tegas dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ketika begitu banyak baliho yang terpasang, terlihat bahwa masyarakat memang serius dalam menghadapi

pembangunan apartemen yang dapat membuat lingkungan balirejo tidak baik lagi.

**Gambar 6 : Proses Pemasangan Baliho Oleh Warga**



*Sumber: Dokumentasi Mas Andi*

c Warga Balirejo RW 05 dan RW 06 Melakukan Audiensi Kepada Satpol PP kota Yogyakarta, Kelurahan, DLH, FORPI, dan WALHI

Audiensi menurut (KBBI) adalah kunjungan kehormatan. Yang biasanya dilakukan antara masyarakat dan pemerintah. Setelah membuat petisi dan baliho, ternyata bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat semakin meluas. Warga yang menolak, melakukan Audiensi dengan pihak Satpol PP terkait pembangunan apartemen sesuai yang dikatakan bapak Dono Susilo Ketua RW 05 wawancara pada 18 Mei 2019:

“..semua instansi kami tembusi seperti DLH, camat, ombudsman. Waktu itu kami mengirim surat penolakan ke kelurahan terus FORPI juga. Kami juga melakukan pertemuan dengan Satpol PP jogja.”

**Gambar 7 : Bukti Pengaduan Kepada Pemerintah**



*Sumber: Dokumentasi Mas Andi*

**Gambar 8 : Proses Audiensi Warga dengan Forpi dan Satpol PP**



*Sumber: Dokumentasi Mas Andi*

Setelah melakukan audiensi dengan pihak Satpol PP, warga mendapat berita baik dan merupakan angin segar dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP mendatangi lokasi pembangunan apartemen dan menutup proses pembangunan apartemen, dikarenakan melanggar aturan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 mengenai bangunan gedung. Kemudian warga memberikan karangan bunga atas tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. sesuai yang dikatakan oleh Bapak Dono Susilo Ketua RW 05 wawancara pada 18 Mei 2019:

“...iya kami memberikan karangan bunga, kami mengapresiasi tindakan tegas yang mereka ambil .”

### Gambar 9: Apartemen di Segel



*Sumber: Dokumentasi Mas Andi*



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Selain melakukan audiensi dengan pihak diatas, salah satu strategi yang digunakan warga balirejo adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak WALHI. Warga datang untuk menanyakan sikap WALHI dan menanyakan undang-undang lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Dono Susilo Ketua RW 05 Balirejo wawancara pada 16 Juni 2019:

“pihak walhi kami datangi untuk menanyakan sikap WALHI terkait masalah AMDAL.”

WALHI sendiri berada pada posisi Anggota Komisi Penilaian AMDAL dalam rencana pembangunan apartemen. Bapak Adi dari pihak WALHI membenarkan adanya pengaduan. Namun, sampai saat ini pihak WALHI belum mengetahui bentuk yang akan dilakukan namun mereka tetap mengacu pada UU lingkungan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Adi selaku Ketua bidang Advokasi WALHI, wawancara pada tanggal 21 Juni 2019:

“sampai saat ini kami masih sebatas komunikasi biasa, karena belum ada tindak lanjut mengenai yang akan dilakukan kedepan. Warga datang ke WALHI setelah ada undangan untuk sidang AMDAL, tapi warga menolak untuk hadir di siding. Sampai saat ini hanya sebatas komunikasi biasa dan belum ada arah mau kemana. Kami saat itu hanya membantu melalui kampanye karena disana ada ruang terbuka hijau disebelah jembatan. Jadi kami harus ketemu dulu dengan warga.”

Menurut Peneliti, langkah untuk melakukan audiensi yang dilakukan warga Balirejo sangat efektif dan bermanfaat. Terbukti bahwa beberapa hari setelah melakukan audiensi, proyek pembangunan apartemen disegel oleh Satpol PP sampai saat ini. Meskipun terdapat beberapa pihak instansi pemerintah yang masih terlalu berat sebelah ke pengembang, tetapi dalam audiensi ini keluhan dan fakta yang dibawa dan dinyatakan oleh masyarakat balirejo berhasil diterima dan ditindak dengan tegas. Terbukti warga yang menolak apartemen bukan warga yang mudah untuk dihasut. Selama hampir empat tahun perjalanan penolakan warga masih tetap kokoh untuk kapanpun turun ke jalan jikalau ada yang dirasa ganjal dan merugikan banyak pihak.

d. Warga Kembalikan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus RT dan RW Kepada Kelurahan

Bentuk perlawanan yang terakhir dilakukan oleh Warga balirejo adalah mengembalikan SK sebagai pengurus RT dan RW ke kelurahan pada tanggal 15 Januari 2019, dikarenakan pengurus resmi yang mewakili masyarakat tidak dilibatkan dalam siding AMDAL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Yogyakarta. Sesuai yang diceritakan oleh bapak Dono Susilo Ketua RW 05 Balirejo wawancara pada 16 Juni 2019:

“iya saat itu kami datang untuk menyerahkan SK pengangkatan kami, karena kami sebagai perwakilan dari masyarakat tidak satupun yang diikutkan dalam sidang AMDAL.”

Melihat hal yang dilakukan oleh warga yang mengembalikan SK kepengurusan di tanggapi oleh lurah Mujamuju. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Jemari, wawancara pada 11 Juni 2019:

“iya saat itu warga datang untuk mengembalikan SK, kita tindak lanjuti beberapa hari setelah itu. Kami pertemuan semua disini. Kalau untuk sekarang saya rasa sudah selesai semua.”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Sudarto Ketua RT 17 wawancara 19 Mei 2019:

“..kami kumpul di kelurahan, sudah selesai kalau itu mas, pihak dari kelurahan sama camat sudah meminta maaf atas tindakannya.”

Menurut peneliti, dari beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan, pengembalian SK yang dilakukan oleh setiap RT/RW yang sangat efektif. Terlihat bahwa pengembalian SK yang dilakukan akan berdampak terhadap pihak kelurahan yang nantinya akan terjadi kekosongan jabatan, sedangkan RT/RW merupakan perpanjangan tangan dari pihak kelurahan kepada masyarakat. Dari beberapa perlawanan yang pernah ada, bentuk perlawanan inilah yang peneliti anggap paling unik dan menarik. Warga berhasil membuat pihak pemerintah dan pengembang tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan. Kalau dilihat dari teori yang peneliti gunakan, menurut Tarrow dalam

(Suharko 2006:5-7) salah satu indikator untuk mengukur gerakan sosial adalah Tujuan Bersama. Keinginan untuk bersama-sama melakukan gerakan melawan pihak yang merugikan sangat jelas dalam bentuk perlawanan ini.

**Gambar 10: Pengembalian SK Oleh RT dan RW**



*Sumber: Dokumentasi Oleh Mas Andi*

### C. Dampak Perlawanan Masyarakat Balirejo

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh warga Balirejo dalam menolak pembangunan apartemen Puri Notoprojo sangat bervariasi dan terus berkembang. Setiap kejadian yang dilakukan pasti akan memberikan dampak, baik dampak yang positif maupun memberikan dampak negatif. Perlawanan warga Balirejo RW 05 dan 06 dalam menolak pembangunan apartemen berdampak bahwa sampai pada saat ini proses pembangunan apartemen secara fisik telah berhenti dan berdampak pada masalah sosial.

Peneliti pada bagian ini melihat dari kejadian yang ada di lapangan dan berdasarkan dari pengamatan. Sesuai yang dikatakan oleh Karim (1999:40) bahwa sebuah penolakan terhadap suatu pembangunan akan menimbulkan konflik sosial yakni perubahan dalam rana sosial. Diantaranya perubahan sosial yang terjadi di Balirejo yaitu:

a) Informasi Satu Arah

Terjadinya penolakan apartemen yang dilakukan warga Balirejo ternyata memiliki dampak dari segi informasi. Masyarakat banyak yang lebih berhati-hati dan bungkam terhadap informasi. Informasi mengenai penolakan apartemen sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa masyarakat menyerahkan semua ke RT/RW sebagai perwakilan dari mereka. Dalam melakukan penelitian penulis merasakan bahwa masyarakat ketika disinggung mengenai pembangunan apartemen memilih untuk diam. Warga memilih diam karena warga memiliki alasan, yaitu warga tidak mengetahui secara detail terkait perlawanan dan warga takut dengan kesalahan informasi yang diberikan, dikarenakan isu penolakan sangat sensitif.

b) Perubahan Kondisi Sosial

Terbaginya dua kubu antara setuju dan tidak setuju terkait penolakan apartemen yang terjadi di kampung Balirejo membuat kondisi sosial yang ada di masyarakat berubah. Terdapat permainan-permainan halus yang dimainkan diantara kedua pihak yang mengakibatkan kesenjangan sosial terjadi. Melihat dari penolakan yang dilakukan sampai saat ini terjadi gesekan antar warga, saling curiga, saling menghina, kemudian adanya permaian sogok-menyogok yang dilakukan tanpa diketahui oleh RT/RW sebagai pengurus. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Tentunya yang harus digaris bawahi disini adalah apa yang dilakukan oleh pihak pengembang sehingga terjadi perpecahan

diantara masyarakat, meskipun dari pihak yang setuju hanya sedikit jumlahnya. Namun berefek untuk kelangsungan hidup diantara masyarakat. Warga balirejo menerapkan hidup dengan budaya dan kearifan lokal sebagai landasan untuk bersatu. Tentunya adanya kondisi demikian adalah sesuatu yang tidak diharapkan.

Sesuai dengan teori dari Karim (1999) yakni perubahan sosial terjadi akibat adanya pergerakan untuk menolak suatu pembangunan yang dapat menimbulkan konflik dan dampak sosial yaitu perubahan sosial. Kerukunan antar warga merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Kerukunan harus dijaga untuk pemersatu keberlangsungan hidup di daerah tersebut.

Melihat perubahan sosial yang terjadi penulis lebih setuju dengan yang dikemukakan oleh MacIver dalam (Soekanto, 2009:263) mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan sosial. Dalam menyesuaikan dengan yang ada pada perubahan di masyarakat Balirejo. Dapat dilihat bahwa pembangunan apartemen yang memunculkan penolakan apartemen berdampak ke perubahan yang terjadi dengan melihat kenyataan bahwa keseimbangan hubungan antara masyarakat tidak terjalin dengan baik. Dengan melihat fakta yang ada dilapangan munculnya rasa curiga, intimidasi, berita bohong dan yang paling parah adalah ujaran kebencian. Hal inilah yang menjadi

pengaruh terhadap keseimbangan pola perilaku yang ada pada masyarakat kampung Balirejo.

Munculnya respon dari masyarakat balirejo ternyata bertentangan antara pengembang, masyarakat dan pemangku kekuasaan. Melihat pergerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat bukannya tanpa alasan yang jelas. Maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus melihat, menimbang, dan merasakan dengan jelas dan cermat untuk mengambil tindakan yang nantinya tidak memberikan dampak yang buruk untuk masyarakat.

Dalam perkembangan penolakan terhadap apartemen pergerakan masyarakat balirejo dapat dilihat sebagai kelompok kepentingan *Non-Asosiasional*, sesuai teori yang penulis gunakan, menurut Gabriel (2018) kelompok yang terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan. Melihat bahwa gerakan penolakan yang dilakukan warga balirejo adalah atas dasar kepentingan yang sama untuk menolak pembangunan Apartemen Puri Notoprojo.

Melihat dari perlawanan yang dilakukan masyarakat balirejo maka dapat dikaitkan bahwa masyarakat balirejo sebagai kelompok kepentingan Non-Asosiasional yang kenggotannya tidak melalui proses pemilihan, terlihat bagaimana warga yang memiliki misi yang sama, otomatis sudah dapat menjadi bagian dari kelompok gerakan penolakan Apartemen. Kemudian bekerja tidak teratur hanya ketika waktu tertentu saja, hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menolak pembangunan, struktur dalam gerakan tidak terlihat sama sekali jadi setiap individu saling mengisi satu

dengan yang lain. Kemudian sebagai kelompok yang bergerak secara sukarela, hal ini terkait dengan bagaimana masyarakat balirejo selama melakukan perlawanan, mereka menjaga persaudaraan antar individu. Bukan hanya antar individu, bahkan dengan pihak yang dilawan warga balirejo tidak melakukan aksi-aksi yang mengacaukan atau merusak tatanan yang ada.

### **3. Mobilisasi Gerakan Perlawanan Warga Balirejo**

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia, memperlihatkan bahwa Negara mampu menghimpun pendapat tiap orang untuk dikemukakan di depan umum, baik dalam bentuk tulisan, diskusi maupun aksi. kebijakan pemerintah yang terkadang tidak memihak kepada masyarakat, menimbulkan pertentangan yang melahirkan kekecewaan, ketidakpuasan serta ketidakadilan, hingga memunculkan sebuah gerakan sosial. Gerakan masyarakat yang terjadi di banyak daerah di Indonesia menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dianalisis berdasarkan sudut pandang mobilisasi sumber daya (Sari, Jurnal Politik Indonesia, No. 1, September 2017:129-130).

Menurut McCarthy dan Zald (1977: 1213) menjelaskan aspek penting dalam memobilisasi sumber daya seperti basis dukungan, strategi dan pendekatan, relasi dengan masyarakat luas. Gerakan sosial bukanlah gerakan yang tertutup, namun memiliki sebuah hubungan dan jaringan luas dengan organisasi lain.

Dalam konteks kasus Balirejo, masyarakat yang tergabung menyusun rencana untuk mendesak pemerintah membatalkan rencanan pembangunan apartemen Puri Notoprojo. Bentuk perlawanan meliputi empat tahapan.

Tahapan pertama membuat memperkuat internal kelompok gerakan dengan membuat petisi penolakan, tahapan kedua mengkampanyekan penolakan dengan memasang baliho di sekitar kampung, tahap ketiga membuat laporan pengaduan kepada DLH, FORPI, Satpol PP, Kelurahan, dan Kecamatan, dan tahap keempat pengembalian SK kepengurusan RT dan RW. Dalam bentuk perlawanan masyarakat terkandung tiga aspek mobilisasi sumber daya.

Aspek pertama adalah basis dukungan berupa dana, fasilitas, dan tenaga. Masyarakat mendapatkan dana melalui iuran sukarela warga Balirejo. Tidak ada paksaan sama sekali, masyarakat dengan sukarela setiap akan melakukan aksi menggunakan uang hasil iuran untuk mendukung kebutuhan pergerakan. Seperti saat masyarakat akan memasang baliho penolakan, uang hasil iuran digunakan untuk melakukan pembuatan baliho yang dipasang di kampung Balirejo.

Aspek kedua adalah strategi dan pendekatan. Salah satu tujuan dari gerakan perlawanan agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka diperlukan pendekatan dengan stakeholder. Warga mengupayakan untuk melakukan audiensi dengan pihak DLH, FORPI, Satpol PP. warga mengumpulkan bukti-bukti aktivitas pembangunan yang menyalahi aturan oleh PT Abyudaya Tata Anugrah Mandiri, bukti tersebut digunakan sebagai alat pendukung laporan pegaduan kepada pemerintah. Selain membangun relasi dengan pemerintah, masyarakat juga melakukan pendekatan dengan pihak WALHI. Dengan mendatangi kantor WALHI dan melakukan komunikasi terkait isu lingkungan.

Aspek Ketiga yaitu relasi dengan masyarakat luas, masyarakat melakukan komunikasi dengan beberapa kelompok yang juga memiliki kesamaan tujuan yaitu menolak pembangunan apartemen. Seperti dengan warga plemburan yang juga melakukan perlawanan terkait dengan pembangunan apartemen Dhika Universe. Relasi juga dibangun dengan media massa. Peran media massa menjadi penting sebagai sarana untuk mempublikasikan berita kepada masyarakat umum, baik media cetak, media televisi maupun media online.

Warga Balirejo juga membangun jaringan komunikasi untuk memperkuat mobilisasi sumber daya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar rencana pembangunan apartemen Puri Notoprojo tidak terlaksanakan. Dengan demikian kekhawatiran masyarakat atas masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan dengan adanya apartemen tidak akan dirasakan.

Mobilisasi yang dilakukan warga Balirejo oleh setiap perwakilan Ketua RT dan RW merupakan tindakan yang diambil oleh pihak ketua untuk menghadapi pihak lawan, yang disini adalah pihak pengembang, dan untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah untuk menyuarakan keinginan dari warga kampung Balirejo di RW 05 khususnya. Masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada masing-masing ketua RT dan RW karena masyarakat sadar akan sulit untuk menghadapi pihak pengembang secara langsung. Maka jalan untuk memberikan kepercayaan kepada pemimpin mereka merupakan suatu strategi yang sangat baik.

#### **4. Dinamika Gerakan Perlawanan Warga Balirejo**

Rencana untuk membangun apartemen oleh PT. Abyudaya Tata Anugrah Mandiri, sebagai pengembang yang sampai saat ini masih terus

mencoba untuk bisa membangun Apartemen di kampung Balirejo. Tahun 2017 adalah mulai adanya rencana dari pihak pengembang untuk melakukan pembangunan apartemen. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pihak pengembang untuk mendapatkan hati masyarakat Balirejo. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengembang mendapat penolakan dari warga balirejo.

Pada tahun yang sama terjadi proses pembangunan yang dianggap warga sebagai salah satu kesalahan. Dikarenakan izin dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar belum ada yang diberikan. Bermula dari inilah perlawanan masyarakat semakin bertambah. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk bisa menghentikan proses pembangunan yang melanggar aturan. Warga mulai melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penolakan terhadap apartemen Puri Notoprojo. Hasilnya warga membuat petisi penolakan yang dikirim kepada instansi yang dirasa dapat mendengar aspirasi mereka. Namun warga belum berhasil untuk memberhentikan pembangunan.

Langkah tegas selanjutnya dilakukan oleh warga Balirejo. dengan bermodalkan data dan fakta yang ada dilapangan, warga mendatangi pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan, FORPI, dan Satpol PP untuk melakukan audiensi. Hasil dari audiensi mendapat respon yang baik dari pihak Satpol PP. Beberapa hari setelah proses audiensi dilakukan, pihak Satpol PP dan FORPI mendatangi dan menyegel lokasi pembangunan apartemen, dikarenakan pihak pengembang melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, yang didalamnya mengatur mengenai

bangunan gedung harus memiliki izin sebelum melakukan pembangunan. Sehingga proyek pembangunan apartemen disegel sampai saat ini.

Tahun 2018, muncul masalah baru terkait dengan salah satu syarat untuk mendapatkan IMB adalah melakukan sidang terkait AMDAL. Namun dalam perjalanan mengurus AMDAL, pihak pengembang melakukan kesalahan dikarenakan beberapa warga sebagai perwakilan dari aspirasi masyarakat Balirejo di RW 05, tidak dilibatkan.

Tahun 2019, menindak lanjuti masalah yang terjadi sebelumnya, beberapa warga dan perwakilan ketua RT dan RW kembali menyuarakan tuntutan dengan mendatangi kantor Kelurahan Muja Muju, untuk mengembalikan Surat Keterangan pengangkatan kepengurusan sebagai ketua RW dan RT yang sah. Atas dasar tidak diikuti sertakan dalam proses sidang AMDAL yang membuat warga mendatangi kantor Kelurahan Muja Muju.

Tahun 2019 ini, hasil dari perlawanan yang dilakukan masyarakat berhasil menghambat proses pembangunan apartemen Puri Notoprojo. Baik proses pembangunan fisik maupun proses perizinan. Namun warga Balirejo sadar bahwa perjuangan belum berakhir. Dikarenakan proses pembangunan masih dapat dilakukan apabila syarat-syarat berhasil dipenuhi oleh pihak pengembang. Masyarakat terus waspada dan bersiap jika muncul rencana-rencana baru yang terkait dengan pembangunan Apartemen Puri Notoprojo di Dusun Balirejo.

Dinamika gerakan Masyarakat Balirejo dapat diringkas Seperti bagan berikut ini:

**Gambar 11 . Bagan Gerakan Perlawanan Warga Balirejo**

